
Ngo dan Pengentasan Masalah Kemiskinan

I. G. A. A G Dewi Sucitawathi
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
iga_dewi@undiknas.ac.id/gustiagungdewi@gmail.com

How to cite (in APA style):

Sucitawathi, I. G. A. A G. (2019). Ngo dan Pengentasan Masalah Kemiskinan. *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 8(2), pp.60-64. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.8.2.1055.60-64>

Abstract

Development is related to modernization (Willis, 2005). Development requires involvement of the state as the responsible and supervisor of national economy. The development of the state can not only be measured from economic, such as trade activities both local, national and international. Development itself should be able to guarantee not only the economic welfare (macro), but also social welfare of society (micro). The actor as an actor in the development turned out to have weaknesses, especially its in improving the social welfare of the community in particular. This is what causes poverty to be a problem that has not been solved by the state. The problem of non-resolving poverty is the cause of the emergence of other actors, namely Non-Governmental Organizations (NGOs) to help governments solve poverty problems through 'empowerment programs.

Keywords: Empowerment Programs; NGO; Poverty

I. PENDAHULUAN

Di negara maju cara terhindar dari kemiskinan adalah dengan cara menyelesaikan sekolah terlebih dahulu, tidak hamil diluar nikah, mencari pekerjaan apa saja dan bertahan pada pekerjaan tersebut (Tanner, 2003). Tapi dari beberapa cara tersebut yang terpenting adalah memiliki pekerjaan tetap terlebih dahulu. Di negara maju dalam kondisi ekonomi yang buruk dan tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan negara berusaha untuk menciptakan lapangan kerja semaksimal mungkin. Masyarakat miskin di negara maju memiliki pemikiran bahwa mencari pekerjaan yang baik adalah suatu kebutuhan bahkan ketika kondisi ekonomi negara mereka dalam keadaan stabil. NGO bernama Yayasan Rockefeller meneliti masyarakat miskin di Boston antara tahun 1980 dan 1988 dan mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil menyebabkan tingkat pengangguran menurun 4%. Penelitian tersebut bisa membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi negara bisa menurunkan angka kemiskinan.

Kemiskinan memiliki makna yang relatif, di negara maju kondisi miskin diartikan tidak memiliki pekerjaan, sedangkan di negara berkembang kondisi miskin berarti tidak terpenuhinya kebutuhan primer seorang manusia yaitu sandang, pangan, papan. Jadi pengertian hidup miskin harus dilihat dari ruang dan konteks yang berbeda. Di negara maju, selain pemerintah civil society (LSM) yang dikenal dengan NGO sudah bekerja dengan baik untuk mengurangi beban pemerintah membantu masyarakatnya keluar dari kemiskinan. Sedangkan di negara berkembang kebanyakan pengentasan kemiskinan hanya mengandalkan pemerintah, tanpa adanya kesadaran penuh berupa dukungan (*support*) dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) itu sendiri. Sehingga inilah yang menyebabkan masalah kemiskinan tidak kunjung dapat terselesaikan.

Negara maju juga memiliki peran dalam membantu negara berkembang dalam mengatasi problem kemiskinan, seperti skema bantuan asing (*foreign aid*), dan ODA (*official development assistance*). Tetapi setiap bantuan tersebut memiliki prasyarat, ibarat koin yang memiliki dua sisi. Sisi pertama terkait dengan isu '*money changing hands*', dan sisi kedua '*ideas changing minds*' (Brinkerhoff, Smith & Teegen, 2007). Tiap bantuan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma, semua harus mengikuti syarat yang memang diinginkan oleh negara pendonor. Sisi mata uang pertama menekankan pada masalah 'anggaran, akuntabilitas, transparansi'. Sedangkan sisi kedua menekankan pada masalah perubahan cara berpikir masyarakat untuk tidak malas, dan harus kreatif bergerak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bantuan modal yang diberikan baik ekonomi dan sosial tersebut penting, tetapi belum tentu 100% akan membuat masyarakat di suatu negara sejahtera. Semua tergantung dari kemampuan menggunakan dan mengolah bantuan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif dan efisien.

II. PEMBAHASAN

Seluruh pemerintah dunia saat ini menggunakan acuan program MDG's (*Millenium Development Goals*) dalam melihat kemajuan pembangunan yang telah mereka lakukan. Beberapa isu yang ada dalam program tersebut diantara masalah kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan pengangguran. Dan masing-masing isu saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh seorang individu tidak akan mampu bekerja dengan baik apabila kondisi kesehatannya buruk. Dan kondisi kesehatan seseorang bergantung pada gizi, nutrisi yang mereka dapatkan sejak kecil hingga dewasa. Mustahil suatu negara dapat menghasilkan SDM unggul apabila kualitas pertumbuhan yang didapatkan tidak baik. Selain itu isu tentang perempuan juga menjadi fokus utama dalam program MDG's. Pemerintah dunia diajak untuk lebih 'care' terhadap kondisi kaum perempuan baik sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Keadilan sosial ekonomi (pendapatan layak) tidak akan terwujud apabila masih ada ketimpangan gender.

Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang kompleks tersebut sendiri, dalam hal inilah diperlukan peranan NGO dalam membantu meringankan beban/tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya. NGO sebagai aktor ketiga (*third sector*) mampu membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Berikut beberapa isu kemiskinan yang sering muncul di negara berkembang yaitu masalah buruh anak, tingkat buta huruf, modal kerja, tingkat kemampuan (*skill*) rendah, lilitan hutang, tingkat kelahiran tinggi, masalah pemenuhan kebutuhan mendasar (sandang, pangan, papan), dan masalah erosi pertanian. Beberapa peran NGO dalam menangani masalah kemiskinan adalah:

1. Menciptakan Inovasi: inovasi yang dimaksud adalah peran NGO dalam menciptakan program yang memang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat miskin. Dalam hal ini sebuah NGO berperan untuk menciptakan inovasi yang akan diwujudkan dalam bentuk rancangan, program, dan implementasi kegiatan. Sebagai contoh NGO menjadi pionir program pendidikan dasar non-formal (*non-formal primary education*), mengadakan kampanye melalui komunitas pendukung melek huruf, kegiatan menonton bersama di desa dengan tujuan memupuk rasa solidaritas dan kebersamaan, dan kegiatan pelatihan komputer untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat miskin.
2. Fleksibilitas Program: sebagai organisasi yang independen, kegiatan yang dilakukan NGO tidak terpengaruh oleh intervensi program pemerintah baik yang berskala lokal dan nasional. Selain itu kegiatan NGO tidak terlalu dipengaruhi oleh tuntutan kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah daerah, dengan arti NGO memiliki kebebasan menentukan visi misi yang menjadi target kerja mereka.
3. Memiliki Spesialisasi Pengetahuan Teknis: NGO biasanya memiliki tenaga ahli yang terspesialisasi pada bidang tertentu. Keahlian mereka kadang melebihi pegawai pemerintah. Pengetahuan yang mereka miliki sangat membantu menyelesaikan masalah riil masyarakat. Keahlian khusus (spesialisasi) bermanfaat untuk menciptakan program yang unik dan memang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, sebagai contoh NGO The Grameen Phone Lady di Bangladesh.
4. Memiliki Target Kebutuhan Publik Lokal: dalam hal ini NGO berperan dalam menyediakan akses berupa fasilitas kesehatan, pendidikan non-formal, kerjasama untuk memperbaiki infrastruktur masyarakat desa, hingga penyediaan akses teknologi informasi.
5. Rancangan Pengaturan Kepemilikan Sumberdaya Bersama: dalam hal ini NGO berperan menyadarkan masyarakat akan kepemilikan sumber-sumber alam seperti makanan dan perlindungan, sebagai hak yang pantas didapatkan. NGO dalam kegiatan ini dapat melaksanakan pelatihan, mengadakan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah lainnya, demi tercapainya kebaikan bersama.
6. Kredibilitas dan Kepercayaan: dalam hal ini NGO dipercaya untuk mengemban tugas mengentaskan kemiskinan karena NGO dianggap memiliki kemandirian untuk membentuk struktur pengelola organisasi yang didasarkan pada prinsip profesionalitas, kompetensi, keadilan, reliabilitas, transparan, dan konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat miskin.
7. Perwakilan dan Advokasi: dalam hal ini NGO dipercaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang tidak memperoleh keadilan ditengah-tengah kehidupan berdemokrasi sebuah negara.

Program pemberdayaan masyarakat NGO dilakukan dengan cara memberikan ‘pancing’ bukan ‘ikan’ kepada masyarakat. Artinya program yang mereka buat harus diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat untuk mau bekerja keras, belajar, dan berjuang untuk sukses. Seperti contoh program pendidikan dasar non-formal di Bangladesh diberikan oleh NGO bernama BRAC (Building Resources Across the Countries), program pendidikan ‘Save The Children’ untuk buruh-buruh anak di Mali dan Uganda. Dalam bidang pendidikan tersebut NGO memberikan bantuan biaya sekolah dan juga memfasilitasi anak-anak putus sekolah untuk bisa belajar seperti anak-anak pada umumnya. NGO akan merekrut relawan-relawan lokal sebagai guru untuk mengajar anak-anak tersebut. Bantuan pendidikan tersebut idealnya harus juga diimbangi dengan kesungguhan belajar dari anak-anak itu sendiri, agar tujuan dari program pemberdayaan berbuah hasil.

Contoh lain peran penting NGO dalam pengentasan kemiskinan dengan mengacu pada unsur pendidikan adalah NGO mampu memberikan advokasi untuk menghapuskan biaya sekolah, biaya seragam, dan pengeluaran lainnya bagi anak-anak miskin di Kenya dan Uganda. NGO bernama Pratham di India malah membuat program unik berupa layanan les dan program percepatan belajar (kelas akselerasi) untuk anak-anak miskin supaya bisa mengejar ketertinggalan pengetahuan dari anak-anak mampu di India. Di India, NGO bernama SEWA (Self Employed Women’s Association) memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan-perempuan di India dengan cara memberikan pelatihan keterampilan yang mampu menghasilkan produk untuk mereka jual.

Melalui program pemberdayaan diharapkan kaum perempuan di India mampu mandiri, menghasilkan, terlepas dari belenggu kemiskinan jasmani (hidup layak) dan rohani (mentalitas baik). Selain pendidikan NGO juga berperan dalam mengentaskan masalah kesehatan seperti program bebas kelaparan dari NGO bernama Finca di Uganda dan Ghana. NGO bernama International Relief Committee bekerja untuk mengentaskan masalah kekurangan gizi, memberikan suplemen makanan bagi masyarakat miskin di beberapa negara berkembang. NGO bernama CARE memberikan penyuluhan pentingnya kontrol terhadap tingkat kelahiran dan tingkat kesehatan bayi dan anak bagi masyarakat di Ethiopia.

Beralih dari pendidikan dan kesehatan, NGO juga berperan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat dengan mengacu pada masalah ekonomi. Seperti contoh NGO bernama Grameen dan BRAC di Bangladesh memberikan bantuan modal melalui kredit mikro, membantu akses pemasaran, dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Selain itu NGO bernama FMMC di Nepal membantu masyarakat sekitar untuk mencari alternatif sumber pendapatan baru.

Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan swasta di Nepal mengabaikan kesejahteraan ekonomi pekerja dan hanya memikirkan kesejahteraan ekonomi pemilik perusahaan. NGO bernama Krishna Bhima Samruddhi di daerah Maboobnagar India memberikan bantuan kredit pada petani kecil khususnya dalam pembelian pupuk dan bibit tanaman, tujuannya agar tidak dimonopoli oleh petani-petani besar. NGO bernama Africare memiliki misi dengan menciptakan program sosial bagi masyarakat desa terpencil di daerah pegunungan yang terisolir dari modernisasi. Tujuan NGO Africare untuk membuat masyarakat tahu cara mencari sumber tanaman alternatif baru, yang bisa mendatangkan nilai tambah tinggi contohnya masyarakat tersebut menanam tanaman buah-buahan yang cocok hidup dengan kondisi pegunungan.

Selain ekonomi, beberapa NGO juga fokus dalam memberikan bantuan transfer teknologi bagi masyarakat miskin di beberapa negara berkembang. Salah satunya NGO bernama CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) bekerja untuk mengurangi erosi pertanian, dengan cara memberikan pelatihan manajemen pengelolaan tanah melalui pemanfaatan teknologi agrikultur bagi petani lokal. Selain itu NGO juga berperan dalam mengatasi masalah lingkungan, seperti NGO Gram Vikas di India memberikan pelatihan pengelolaan sumber alam yang benar, khususnya sumber mata air agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu NGO bernama Greenbelt di Kenya mengajak masyarakat lokal akar rumput untuk melakukan reboisasi terhadap hutan yang terbengkalai.

Masih banyak contoh lain yang bisa membuktikan peranan penting NGO membantu meringankan beban pemerintah mengentaskan masalah pembangunan seperti kemiskinan. NGO bernama ADEW, World Vision di Peru fokus pada pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pelatihan kejuruan dan penyuluhan perlindungan hak perempuan. NGO besar seperti Oxfam Internasional bahkan memiliki program ‘Global Social Movement’ (gerakan sosial global) yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketidakadilan sosial di dunia internasional (Rasdiyah, 2014).

Kemiskinan yang dialami beberapa masyarakat di negara berkembang tidak hanya sesaat, tetapi bisa dialami bertahun-tahun bahkan hingga menular pada generasi selanjutnya. Kondisi ini dinamakan ‘poverty trap’ (perangkap kemiskinan), dimana masyarakat sama sekali tidak mampu bergerak untuk mendapatkan hidup yang lebih layak baik ekonomi dan sosial. Poverty trap inilah yang berusaha ditanggulangi oleh NGO, dengan tujuan masyarakat miskin bisa hidup lebih baik dan layak. Sehingga Kemiskinan tidak hanya bisa diartikan ‘masyarakat yang hidup dibawah 1\$ perhari versi World Bank (makro), tetapi lebih luas kemiskinan bisa diartikan buruk kesehatan, buruk pendidikan, buruk lapangan kerja, buruk pertanian, buruk kondisi lingkungan/alam (mikro). Berikut bisa dilihat beberapa peran NGO dalam mengentaskan kemiskinan di beberapa negara berkembang:

Tabel 1
Ngo dan Pengentasan Masalah Kemiskinan

Table 8.1 Types of poverty traps and NGO responses

Type of trap	Type of response		
	Areas of NGO comparative advantage	Specific NGO programmatic activities	Illustrative program examples
Child labor traps	Innovation, flexibility, advocacy	Designing school programs to reach child laborers; advocating improved conditions	BRAC—nonformal primary education (NPE); Save the Children—nonformal schools in Africa, e.g., Mal, Uganda; Peru STC school for street children; legal advocacy
Illiteracy traps	Innovation, flexibility	Designing effective literacy programs for the very poor	Pratham—accelerated learning, India
Low skill traps	Local public goods (including club and toll goods), innovation, knowledge	Developing training programs targeted to low-skill marginalized groups; mentoring for local entrepreneurs with potential for employment expansion	SEWA—developing new markets and skills for members, India; Endeavor, South Africa, South America; SEAF—entrepreneurial skill development and access to capital, Peru, Bolivia
Working capital traps	Innovation, knowledge	Providing microfinance, alone or with complementary basic services, solidarity, etc.	Gramson, FINCA, BRAC, Freedom from Hunger, etc., Bangladesh
Debt bondage traps	Advocacy, innovation, flexibility	Raising awareness; lobbying; identifying bonded laborers; developing alternative work opportunities	Anti-Slavery International; Sankalp, India; Kamaiya FMMC, Nepal
Uninsured risk traps	Innovation, local public goods	Innovating targeted microinsurance for farmers	BASIX/KSR, India
Information traps	Knowledge, innovation	Providing information about alternative livelihoods and training	Gramen Phone Lady; BRAC—Targeting the Ultrapoor Program (TUP), Bangladesh
Undernutrition traps	Advocacy, knowledge	Providing targeted food supplements; advocating for affected areas	Programs operated by International Rescue Committee (IRC)
High fertility traps	Innovation, flexibility	Community mobilization and “cultural transformation”	CARE, Ethiopia
Subsistence traps	Knowledge, local public goods	Helping villages identify and market alternative crops	Africare, Africa Now; BRAC, Bangladesh
Farm erosion traps	Knowledge, flexibility	Providing targeted packages of credit, training, and inputs	TechnoServe and its partners, Tanzania
Common-property mismanagement	Common resource management	Mobilizing, training community organizations	Gram Vikas, India; Sulelo, Tanzania
Powerlessness	Trust, flexibility	Building self-esteem, providing legal and comprehensive training	ADEW, Egypt; Child Helpline, India; World Vision, Peru

Yayasan Bali Wise

Yayasan Bali Wise adalah NGO yang bergerak di bidang sosial bertujuan untuk melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan di Bali. NGO ini melakukan aktivitas berupa pelatihan gratis dan memfasilitasi perempuan untuk dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. NGO bernama Bali Wise juga melakukan kegiatan sosial berupa pemberian sandang, pangan, papan bagi keluarga miskin/RTM, kegiatan bedah rumah, bantuan modal usaha, pemberian santunan tunai, dan bantuan pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak balita.

LSM Kompak (Komunitas Masyarakat Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan)

LSM KOMPAK adalah komunitas masyarakat yang memiliki misi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di Buleleng khususnya, dan mengentaskan aksi-aksi kriminalitas seperti perdagangan anak dan perempuan, pedofil dan premanisme yang semakin marak terjadi. KOMPAK

melakukan aktivitasnya dengan memberikan advokasi/pendampingan kepada masyarakat tidak mampu untuk dapat memperoleh keadilan.

III. SIMPULAN

Kemiskinan tidak hanya bisa diartikan secara ekonomi yaitu masyarakat yang kualitas hidupnya dibawah 1\$perhari, tetapi kemiskinan harus dipahami lebih bijak dan luas yaitu kemiskinan juga diartikan apabila seseorang buruk kondisi kesehatan, buruk kondisi pendidikan, buruk kondisi pekerjaan, buruk kondisi pertanian, buruk pengetahuan teknologi informasi. Oleh karena itu munculnya beberapa NGO melalui program pemberdayaan (*empowerment program*) diharapkan mampu membantu meringankan beban pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu pembangunan salah satunya kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brinkerhoff, J, M., Stephen C, S., & Teegen, H. (2007). *NGOs and the Millenium Development Goals: Citizen Action to Reduce Poverty*. New York. Palgrave Macmilan™.
- <http://balicaringcommunity.org/bali-wise-program-pelatihan-gratis-untuk-perempuan-di-indonesia.html>
(diakses pada tanggal 5 Juli 2017)
- Rasyidah, R. (2014). INGO Sebagai Agent of Aid: Peran dan Kontribusi Oxfam Internasional dalam Penyaluran Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Global & Policy*. 2(1)
- Tanner, D, M., (2003). *The Poverty of Welfare: Helping Others in Civil Society*. Washington, D.C. The Cato Institute
- Willis, K. (2005). *Theories and Practices of Development*. Oxon. Routledge